BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak sebelumnya merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Diawal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan Kerajaannya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian wilayah ini menjadi wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak Pada Tahun 1999, Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan Ibu Kotanya Siak Sri Indrapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada pada koordinat 1016º30º-0020º49º Lintang Utara dan 10054º21º102º10º59º Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura.Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi disebelah barat.

Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah pod solik merah kuning dan batuan alluvial serta tanah orgasonol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, lahan semacam ini subur untuk pengembangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25º-32º Celsius dengan kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat tasik atau danau yang tersebar dibeberapa wilayah Kecamatan.Sungai Siak sendiri terkenal dengan sungai terdalam di tanah air, sehinga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Kecamatan Kandis yang merupakan bagian dari Kabupaten Siak, secara Ketatanegaraan dan Ketatapemerintahan Kecamatan Kandis lahir dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 yang peresmianyya dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2002 oleh Bupati Siak. Sebelumya Kandis merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Minas Kabupaten Bengkalis.

Sebagai Kecamatan baru dimana Kecamatan Kandis terletak dijalan lintas antar provinsi yang memiliki luas wilayah 98.344 Ha, yang memiliki 3 kelurahan dan 8 kampung, dengan jumlah penduduk yang lebih kurang mencapai 67.642 jiwa. Kecamatan Kandis secara bertahap sudah mulai berbenah diri dengan berbagai kegiatan pembangunan, bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan yanng pada intinya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, efesien, efektif dan berdayaguna namun pembangunan disegala bidang kerjasama harus di sinkronkan dengan kebijakan "*Bottom Up Planning*" tanpa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengabaikan " *Top Down Planning Policy*". Diamping itu juga harus ada hubungan yang *sinergis*dan kesepahaman antara masyarakat sebagai *stake holders*, penikmat dari pembangunan dengan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai pelaksana dan penentu pembangunan daerah. Oleh karna itu Pemerintah Kecamatan Kandis tetap menjalankan konsep-konsep pembangunan masyarakat yang mengacu pada visi-dan misi pembangunan Kabupaten Siak dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, kebodohan, dan pembangunan infrastruktur.

Kecamatan Kandis juga merupakan salah satu daerah yang masih terdapat penyakit masyarakat (prostitusi) khususnya di desa-desa yang masih terpencil. Salah satu yang mendasari munculnya penyakit masyarakat ialah perpindahan penduduk dari daerah-daerah lain yang sengaja ingin mencari pekerjaan, namun karena kurangnya pengetahuan dan skil menyebakan susahnya dalam mencari pekerjaan, maka munculah ide untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah yaitu dengan menjadi pekerja seks komersil, dan lambat laun kegiatan tersebut berkembang dilingkungan masyarakat. Salah satu desa-desa yang terdapat praktek prostitusi ialah di desa Sei liko dan masih ada juga terdpat di desa-desa lainya, dengan menempuh jarak yang cukup jauh sekitar 30 menit- 1 jam perjalanan, dan juga keadaan jalan yang masih kurang baik untuk menempuh jarak taersebut.

Kecamta Kandis masi merupakan kecamatan baru, maka diharapkan kepada Pemerintah Povinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak untuk memprioritaskan kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

transportasijalan penghubung antara dusun dan desa, pendidikan dan kesehatan agar kedua sisi dapat terjadi keseimbangan pertumbuhan pembangunan.

Adapun Dasar Hukum terbentuknya Kecamatan Kandis adalah:

1. Kepmendagri NO.4 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan.
2. Peraturan Daerah No. 41 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002.
3. Peresmian Kecamatan sekaligus pelantikan Camat Kandis tanggal 15 Februari 2002 di Kandis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja pemerintahan kecamatan Kabupaten Siak, susunan organisasi pemerintahan terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan dalam masyarakat diwilayah kecamatan seperti:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang diberikan.
- Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan kecamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Mengadakan kerjasama dengan sebaik-baiknya kepada instansi yang terkait setempat dalam rangka memperlancar penyelenggraan pemerintahan.
- Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh walikota dan bupati kepala daerah

2. Sekertaris Kecamatan

Sekertaris kecamatan mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekertariatan yang meliputi administrasi, kepegawaian keuangan umum dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Sekertariat Kecamatan terdiri dari:

- Sub bagian penyusunan program
- Sub bagian keuangan
- Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat desa.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - Menyusun rencana dan program kerja kegiatan
    - Membanu Satpol PP dalam menegakan perda serta perundang-undangan
    - Memberi saran dan pertimbangnan kepada camat
    - Melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat
    - Membuat laporan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan tugas
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
    - Menyusun rencana dan programkerja sebagai pedoman
    - Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat
    - Mendorong dan memberdayakan kelompok dalam pertanian
    - Membuat laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

B. Profil Satpol PP Kecamatan Kandis

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat sipil yang ditugaskan untuk mengawasi dan menertibkan sistem sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kandis dan tenunya akan berhaadapan langsung dengan masyarakat di pedesaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut. Yang menjadi landasan rumusan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis adalah peningkatan dan pemeliharaan kamtibmas(keamanan dan ketertiban masyarakat), an pencegahan tindakan kriminal, dan peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(PEKAT), terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat dalam menegakan Peraturan Daerah di lingkungan masyarakat.

Keberadaan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam pasal 43 tentang Kewajiban Kepala Daera:

1. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memegang teguh Pancasial dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Menegakan seluruh Peraturan Perundang-undangan.
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
5. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.
6. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

C. Visi dan Misi Satpol PP

- **Visi**

Yang menjadi landasan rumusan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis adalah peningkatan dan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindakan kriminal, peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(PEKAT), terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat dalam menegakan Peraturan Daerah di lingkungan masyarakat.

- **Misi**

Adapun misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis ialah meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan personil baik kuantitatf maupun kualitatif
2. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
3. Meningkatkan pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan pedoman kebijakan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Darah(PERDA)
b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, penyuluhan, dokumentasi, dan pelaporan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat dan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Derah, keputusan Bupati

d. Pelaksanaan pembinaan, pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesempatan

e. Pelaksanaan urusan ketatasusilaan

Melihat tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis yang sangat komplek, maka Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis harus memiliki personil yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan.

(1). Komandan mempunyai tugas merencanakan operasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekertariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komandan mempunyai fungsi:

a. Memimpin pelaksanaan tugas sekertariat yang meliputi subbagian penyusunan program, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian;

b. Penyusunan rencana dan program kerja sekertariat;

c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja;

f. Menyelenggarakan kegiatan kesekertariatan yang meliputi perencanaandan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan kearsipan;

g. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;

h. Mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosedur serta penyusunan standar pelayanan minmal beserta indikator kinerja;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanbaik secara tertulis maupun lisansesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(2). Subbagian Penyusunan Program

Subbagian penyusunan program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan tugas di bidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan. Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

a. Menyusun rencana operasional kegiatan kerja subbagian penyusunan proram;

b. Mendistrbusikan tugas dan memberi petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Melaksanakan penyiapan berkas kerja, data dan bahan laporan blanan, tahunan menurut ketentuan yang berlaku;

d. Mengumpulkan dan mengelola data hasil laporan kegiatan;

e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik setra informasi;

f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategi;

g. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

h. Melaksanakan penyelenggaraan prigram kegiatan dan membuat lapran hasil kegiatan;

i. Melaksanakan tugas laian sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertullis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

(3). Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

a. Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;

b. Seksi penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;

b. Memimpin pelaksanaan tugasdi bidangn penegakan peraturan perundang-undanan;

c. Melaksanakan kegiatan pembinanan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penindakan dan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan dan memdistribusikan pekerja dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. Mengkoordinsikan, membina, dan melakukan pembinaan;

e. Menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;

f. Menghimpun berbagai macam pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangannya;

g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penekgakan perundang-undangan daerah.

(4). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;

b. Seksi Kerjasama

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokokmerencanakan operasionalisasi kerja, menjalankan tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan sesuai dibidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga mempunyai fungsi :

a. Memimpin pelaksanaan tugas dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;

b. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja dalam rangka menegakan peraturan perundang-undangan;

c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk dalam rangka menjalankan ketentraman dan ketertiban di masyarakat;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;

e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban baik internal maupun eksternal di lingkungan masyarakat di Kecamatan Kandis;

f. Melaksanakan pengamanan/pengawalan Kepala Daerah/pejabat daerah dalam rangka kunjungan kerja;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(5). Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Satlinmas;

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, dan melaporkan sesuai dibidang tugasnya.

Bidang perlindungan masyarakat juga mempunyai fungsi :

a. Memimpin pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masysrakat;

b. Mengkoordinir penyusunan rencana dan progra kerja dibidang perlindungan masyarakat;

c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan tugas;

d. Melaksanakan penertiban dibidang politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan sosial masyrakat;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam bidang perlindungan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kandis adalah struktur organisasi garis dimana tanggung jawab dan wewenang berada dalam satu garis langsung diri puncak pimpinan kepada masing-masing anggotanya.

Secara terperinci struktur organisasi Kantor Satpol PP kecamatan Kandis dapat dilihat pada gambar berikut ini :

GAMBAR 4.1: STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

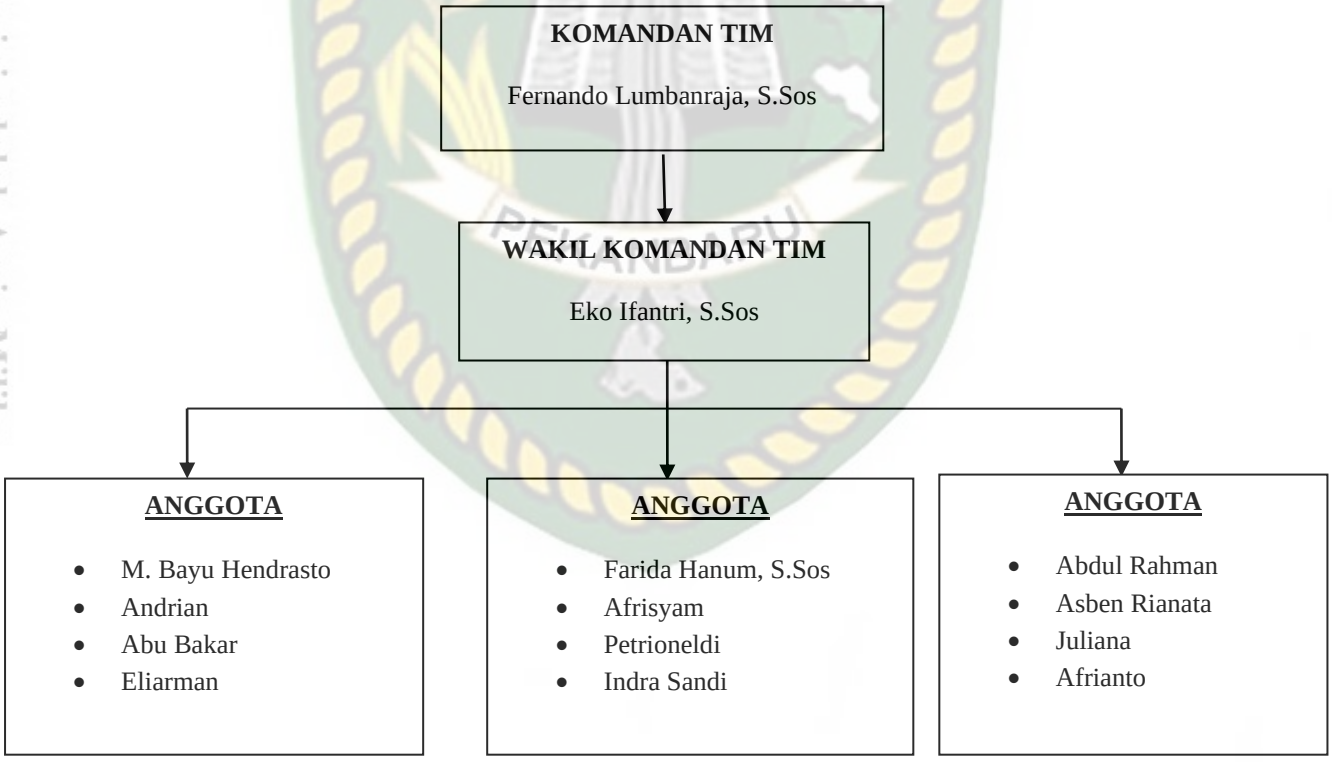

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :